

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Saiful Rahman Yuniarto, S.Sos, M.AB



Penjelasan



Akuntansi pemerintah memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain pemerintah yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis.

Keluasan wilayah pemerintah tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah tersebut.

Secara kelembagaan, domain pemerintah antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat.



Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi.

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor pemerintah dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan hak pemerintah.

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor pemerintah adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana negara.



Dengan demikian, akuntansi sektor pemerintah terkait dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas.

Kerangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah dibangun paling tidak atas lima komponen, yaitu sistem perencanaan strategis, sistem pengukuran kinerja, sistem pelaporan keuangan, saluran akuntabilitas pemerintah (channel of public accountability), dan auditing sektor pemerintah yang dapat diintegrasikan ke dalam tiga bagian akuntansi sektor pemerintah, yaitu: Akuntansi Manajemen Sektor pemerintah, Akuntansi Keuangan Pemerintahan, dan Auditing Pemerintahan.

AKUNTANSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN



Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor pemerintah adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian manajemen. Fungsi perencanaan meliputi perencanaan strategis, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, dan penganggaran, sedangkan fungsi pengendalian meliputi pengukuran kinerja.

Informasi yang diberikan meliputi biaya investasi yang dibutuhkan serta identifikasinya, penilaian investasi dengan memperhitungkan biaya dengan manfaat yang diperoleh (*cost-benefit analysis*), dan penilaian efektivitas biaya (*cost-effectiveness analysis*), serta jumlah anggaran yang dibutuhkan.

Dalam perkembangannya, kelemahan dan ketertinggalan sektor pemerintah dari sektor swasta memicu munculnya reformasi pengelolaan sektor pemerintah dengan meninggalkan administrasi tradisional dan beralih ke *New Public Management* (NPM), yang memberi perhatian lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan akuntabilitas, dengan mengadopsi teknik pengelolaan sektor swasta ke dalam sektor pemerintah.



Penerapan NPM dipandang sebagai suatu bentuk reformasi manajemen, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi (Pecar, 2002).

Perubahan dimulai dari proses *rethinking government* dan dilanjutkan dengan *reinventing government* (termasuk didalamnya *reinventing local government*) yang mengubah peran pemerintah, terutama dalam hal hubungan pemerintah dengan masyarakat.

Perubahan teoritis misalnya dari administrasi publik ke arah manajemen publik, pemangkasan birokrasi pemerintah, dan penggunaan sistem kontrak telah meluas di seluruh dunia meskipun secara rinci reformasinya bervariasi.

Tren di hampir setiap negara mengarah pada penggunaan anggaran berbasis kinerja, manajemen berbasis *outcome* (hasil) dan penggunaan akuntansi *accrual* meskipun tidak terjadi dalam waktu bersamaan.



NPM memberikan kontribusi positif dalam perbaikan kinerja melalui mekanisme pengukuran yang diorientasikan pada pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas meskipun penerapannya tidak bebas dari kendala dan masalah. Masalah tersebut terutama berakar dari mental birokrat tradisional, pengetahuan dan ketrampilan yang tidak memadai, dan peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan cukup peluang fleksibilitas pembuatan keputusan

Sekian.....

Saiful Rahman Yuniarto, S.Sos, M.AB

